

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Lamongan terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Panjang garis pantai sepanjang 47 kilometer memberikan kontribusi signifikan terhadap kegiatan perikanan tangkap laut. Data dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, produksi perikanan tangkap mencapai 84.538,06 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 1,63 triliun. Sementara itu, produksi perikanan budidaya juga menunjukkan angka yang tinggi, yakni 48.978,07 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp 1,33 triliun.

Tidak hanya itu, kemajuan perikanan Kabupaten Lamongan juga diimbangi dengan tumbuhnya sektor pengolahan hasil perikanan di Lamongan. Tercatat terdapat 1.297 unit industri pengolahan ikan, yang menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja. Kemajuan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang terus berkembang, terutama dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. PPN Brondong merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di pesisir utara Pulau Jawa dan menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap di wilayah Jawa Timur bagian barat.

Pelabuhan kelas nasional, PPN Brondong tidak hanya berfungsi sebagai tempat sandar kapal dan bongkar muat hasil tangkapan, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti tempat pelelangan ikan modern yang aktif setiap hari, unit pengisian BBM khusus nelayan, fasilitas pemeliharaan kapal, serta laboratorium mutu dan kesehatan ikan. Dengan kapasitas sandar kapal hingga

skala 100 GT (Gross Tonnage), pelabuhan ini mampu menampung ratusan kapal setiap harinya dan menjadi pusat distribusi hasil laut dari Lamongan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ekspor. Pada tahun 2023, Brondong menjadi penyumbang utama dari total 84.538 ton produksi perikanan tangkap Kabupaten Lamongan, menjadikannya sebagai salah satu sentra ikan laut segar dan olahan terbesar di Jawa Timur.

Meskipun demikian, nelayan di Kabupaten Lamongan mengalami keterpurukan ekonomi yang signifikan akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Keterbatasan akses terhadap teknologi penangkapan ikan modern menyebabkan produktivitas nelayan tradisional menurun drastis, sementara biaya operasional melaut terus meningkat seiring kenaikan harga bahan bakar dan peralatan penangkapan ikan. Ketergantungan pada tengkulak dalam sistem pemasaran hasil tangkapan juga menciptakan rantai distribusi yang panjang dengan margin keuntungan minim bagi nelayan.

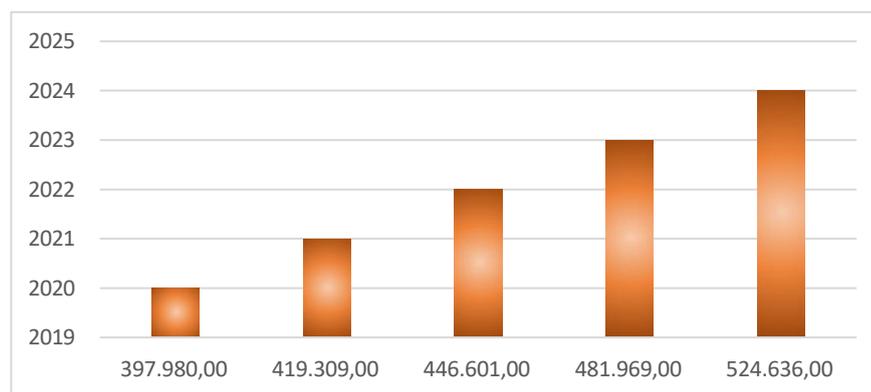
Degradasi lingkungan pesisir dan laut, termasuk pencemaran di kawasan pantai Lamongan, telah mengakibatkan deplesi stok ikan dan menurunnya kualitas hasil tangkapan. Data Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mencatat penurunan pendapatan nelayan sebesar 35% dalam lima tahun terakhir, menjadikan profesi nelayan semakin tidak menjanjikan secara ekonomi. Sistem perlindungan sosial yang belum tentu optimal turut berkontribusi pada kerentanan ekonomi nelayan, dimana jaminan sosial dan akses terhadap layanan finansial formal masih terbatas. Keterbatasan diversifikasi pendapatan dan minimnya alternatif mata pencaharian di luar sektor perikanan membuat nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Keterpurukan ekonomi nelayan Lamongan juga terkait erat dengan

lemahnya posisi tawar dalam rantai nilai produk perikanan. Mayoritas nelayan beroperasi dalam skala kecil dengan modal terbatas, sehingga tidak mampu mengakses pasar yang lebih menguntungkan atau melakukan pengolahan pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah produk. Peningkatan biaya hidup di wilayah pesisir yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan riil nelayan semakin mempersempit ruang ekonomi rumah tangga nelayan, mendorong mereka masuk ke dalam jerat utang yang sulit terselesaikan yaitu kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2024 mencapai 146,98 ribu jiwa. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Lamongan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 524.636,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp 42.667,00 per kapita per bulan.

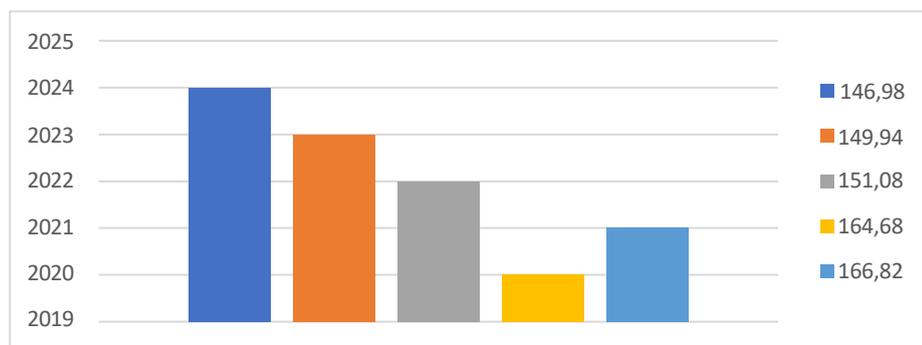
Gambar 1. 1 Grafik Garis Kemiskinan Kab. Lamongan 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2024 (data diolah)

Kondisi yang memperlihatkan meningkatnya Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan) bisa menunjukkan bahwa standar hidup masyarakat juga mengalami perubahan, sehingga batas kemiskinan perlu disesuaikan. Dinamika ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menyebabkan naik turunnya jumlah penduduk miskin. Saat ekonomi membaik, jumlah orang miskin bisa berkurang begitu pula sebaliknya.

Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lamongan (ribu jiwa) Tahun 2020-2024



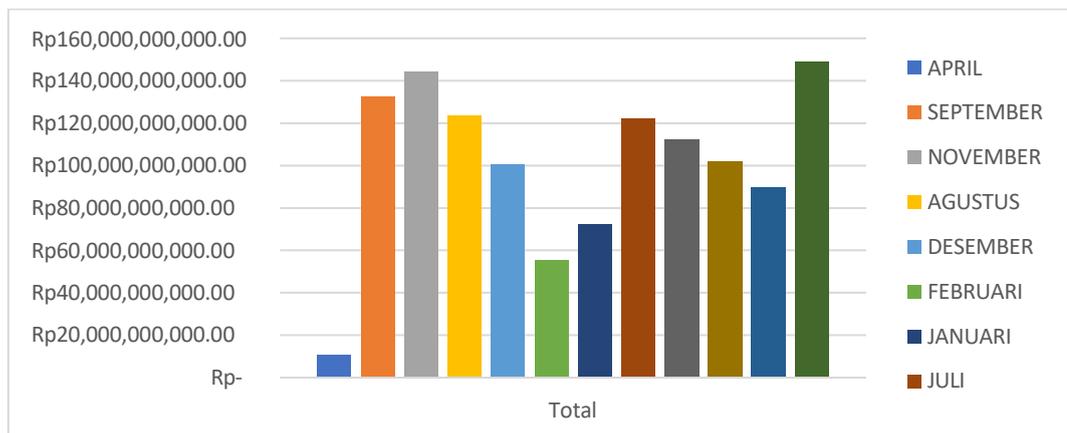
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2024 (data diolah)

Meskipun kondisi menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan cenderung menurun, penurunan jumlah penduduk miskin tidak hanya dilihat dari angka statistik, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sanitasi yang layak. Masyarakat yang bisa keluar dari garis kemiskinan harus benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan, bukan sekedar perbaikan angka sementara.

Keterpurukan kondisi kesejahteraan juga sangat dirasakan oleh nelayan. Meskipun sektor perikanan memiliki potensi besar, nelayan sering menghadapi tantangan yang membuat kesejahteraan mereka tetap rendah atau bahkan memburuk. Faktor yang tidak jarang menyebabkan keterpurukan kesejahteraan nelayan karena fluktuasi hasil tangkap hingga harga ikan yang tidak stabil. Nelayan

sering kali tidak memiliki kendali atas harga jual ikan karena bergantung pada tengkulak atau pasar yang tidak stabil. Contohnya saat panen melimpah, harga bisa anjlok karena permintaan tidak sebanding dengan suplai.

Gambar 1. 3 Data Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) PPN Brondong Tahun 2023



Sumber : PPN Brondong (Data Diolah)

Fluktuasi pemasaran dan distribusi ikan menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam rantai suplai dan permintaan ikan di pasar. Hal ini dapat mencerminkan dinamika ekonomi, lingkungan, dan sosial yang memengaruhi perikanan secara keseluruhan yang dapat menginterpretasikan kondisi ketidakpastian pendapatan nelayan.

Grafik diatas yang diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat menjadi tolak ukur hasil perikanan Kabupaten Lamongan karena pelabuhan ini merupakan pusat aktivitas perikanan terbesar di daerah Lamongan. Pelabuhan ini tidak hanya menjadi tempat pendaratan ikan, tetapi juga pusat perdagangan ikan, dimana para pedagang, tengkulak, dan eksportir membeli hasil tangkapan nelayan. Bahkan harga ikan yang terbentuk di PPN Brondong sering dijadikan acuan harga ikan di pasar lokal dan regional. Jika jumlah ikan yang didaratkan di PPN Brondong meningkat, itu menunjukkan bahwa hasil tangkapan nelayan tinggi dan sektor

perikanan berkembang. Sebaliknya jika jumlahnya menurun, maka dapat menjadi indikasi adanya faktor yang memengaruhi distribusi dan pemasaran hasil tangkapan nelayan Kabupaten Lamongan.

Implementasi konsep *blue economy* di kalangan nelayan Kabupaten Lamongan masih berada pada tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan signifikan. *Blue economy* sebagai paradigma pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis kelautan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan konservasi ekosistem belum terintegrasi secara optimal dalam praktik perikanan tradisional di wilayah ini. Kesadaran dan pemahaman nelayan Lamongan mengenai prinsip-prinsip *blue economy* masih terbatas, tercermin dari dominannya praktik penangkapan ikan yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis. Upaya penerapan teknologi ramah lingkungan yang meminimalkan dampak terhadap habitat laut masih minim diterapkan, sebagian besar dikarenakan finansial dan teknis yang dihadapi nelayan kecil. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lamongan menunjukkan bahwa adopsi praktik *blue economy* di kalangan nelayan masih dibawah 20%, jauh dari target nasional sebesar 50% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Beberapa inisiatif awal *blue economy* mulai bermunculan di komunitas nelayan Lamongan. Kelompok nelayan di Kecamatan Paciran telah mulai mengadopsi praktik penangkapan ikan berkelanjutan melalui penerapan *fishing calendar* dan penggunaan alat tangkap yang lebih selektif. Transisi menuju praktik *blue economy* yang komprehensif membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kebijakan, penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan, dan investasi infrastruktur yang memadai. Kebijakan pengelolaan perikanan di

Kabupaten Lamongan masih cenderung berfokus pada peningkatan produksi daripada keberlanjutan jangka panjang, mencerminkan belum terintegrasinya prinsip *blue economy* dalam perencanaan pembangunan daerah.

Urgensi penelitian *blue economy* di Kabupaten Lamongan juga didasari oleh posisi strategisnya salah satu pilot projek implementasi kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mencanangkan visi “Lamongan Biru” yang mengadopsi prinsip-prinsip *blue economy* dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Lamongan juga menjadi lokasi percontohan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan pendekatan terintegrasi yang mengkombinasikan konservasi ekosistem pesisir dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Transisi dari praktik perikanan konvensional menuju *blue economy* di Lamongan menghadapi tantangan structural berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, akses permodalan, dan kapasitas adaptasi teknologi, membutuhkan kajian mendalam dalam mengidentifikasi intervensi yang tepat sasaran. Penelitian keberlanjutan *blue economy* di Kabupaten Lamongan tidak hanya berkontribusi signifikan bagi kesejahteraan nelayan setempat tetapi juga menyediakan model pembelajaran berharga untuk replikasi di wikayah pesisir lainnya dengan karakteristik serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh antara pendapatan nelayan dengan

kesejahteraan nelayan?

2. Apakah terdapat pengaruh antara hasil tangkap dengan kesejahteraan nelayan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara nilai tambah dengan kesejahteraan nelayan?
4. Apakah penerapan dan peran nyata *blue economy* berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan nelayan terhadap kesejahteraan nelayan.
2. Untuk mengetahui pengaruh hasil tangkap terhadap kesejahteraan nelayan.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tambah terhadap kesejahteraan nelayan.
4. Untuk mengetahui penerapan dan peran nyata *blue economy* terhadap kesejahteraan nelayan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian multidisipliner terkait kesejahteraan nelayan, ekonomi perikanan, dan penerapan konsep *blue economy* dengan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Akademis
 - Memperluas literatur empiris tentang pengaruh aktivitas ekonomi nelayan terhadap kesejahteraan, dengan pendekatan *mixed method*

yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif.

- Memberikan bukti ilmiah bahwa variabel nilai tambah belum signifikan secara statistik, namun tetap penting secara struktural dan potensial dalam pembangunan pesisir, terutama bila dikaitkan dengan praktik ekonomi biru.
- Menunjukkan bahwa *blue economy* bukan sekedar konsep normatif, tetapi memiliki peran nyata sebagai prediktor kesejahteraan sehingga membuka ruang penelitian lanjutan dalam pengembangan model ekonomi pesisir berkelanjutan.
- Memberikan dasar untuk pengembangan indeks integrasi *blue economy* yang bisa diteliti lebih lanjut dalam kerangka evaluasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- Bagi pemerintah daerah dan dinas terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merancang program pemberdayaan nelayan, terutama dalam pelatihan nilai tambah, pengadaan alat produksi, dan integrasi *blue economy* dalam dokumen perencanaan daerah.
- Bagi komunitas nelayan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan acuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas aktivitas ekonomi, dan memahami pentingnya prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
- Bagi lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha perikanan, penelitian ini memberikan gambaran kebutuhan dan potensi nelayan dalam menerapkan inovasi ekonomi biru secara lokal, sehingga

dapat mendesain intervensi atau program pendampingan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

- Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, temuan ini dapat dijadikan bahan ajar, modul pelatihan, atau dasar penyusunan kurikulum pengabdian masyarakat (seperti KKN) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.